



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 berupa Laporan Keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 2.609.501.844.013,92		
b. Belanja dan Transfer	Rp 2.372.645.890.287,06		
Surplus/(Defisit)		Rp	236.855.953.726,86
c. Pembiayaan:			
1. Penerimaan	Rp 47.254.756.068,14		
2. Pengeluaran	Rp 21.000.000.000,00		
Pembiayaan Netto		Rp	26.254.756.068,14

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah		Rp72.743.283.137,92
dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	2.536.758.560.876,00
2. Realisasi	Rp	2.609.501.844.013,92
Selisih lebih/(kurang)	Rp	72.743.283.137,92
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah		
(Rp240.215.818.239,94) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Belanja dan Transfer setelah Perubahan	Rp	2.612.861.708.527,00
2. Realisasi	Rp	2.372.645.890.287,06
Selisih lebih/(kurang)	(Rp	240.215.818.239,94)
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah		
Rp312.959.101.377,86 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp	76.103.147.651,00)
2. Realisasi	Rp	236.855.953.726,86
Selisih lebih/(kurang)	Rp	312.959.101.377,86
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah		
(Rp49.848.391.582,86) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	97.103.147.651,00
2. Realisasi	Rp	47.254.756.068,14
Selisih lebih/(kurang)	(Rp	49.848.391.582,86)
e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah		Rp0,00
dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	21.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp	21.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp49.848.391.582,86) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	76.103.147.651,00
2. Realisasi	Rp	26.254.756.068,14
Selisih lebih/(kurang)	(Rp)	49.848.391.582,86)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Awal	Rp	97.103.147.651,14
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	47.254.756.068,14
Sub Total	Rp	49.848.391.583,00
c. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	263.110.709.795,00
Sub Total	Rp	312.959.101.378,00
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp)	49.848.391.583,00)
e. Lain-lain	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	263.110.709.795,00

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional		
Pendapatan	Rp	2.513.133.924.728,06
Beban	Rp	2.266.064.730.645,75
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	Rp	247.069.194.082,31
b. Kegiatan Non Operasional	(Rp)	1.958.257.161,00)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(Rp)	1.958.257.161,00)
(1) Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	245.110.936.921,31
c. Pos Luar Biasa	Rp	1.458.000.000,00
(2) Surplus/(Defisit)-LO	Rp	246.568.936.921,31

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	6.879.602.145.159,88
b. Surplus/Defisit LO	Rp	246.568.936.921,31
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan (Rp Mendasar		26.184.931.835,39)
d. Ekuitas Akhir	Rp	7.099.986.150.245,80

Pasal 7

Neraca dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	7.536.133.708.793,09
b. Jumlah Kewajiban	Rp	436.147.558.547,29
c. Jumlah Ekuitas	Rp	7.099.986.150.245,80

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD, Kas Di Bendahara Pegeluaran, KAS BLUD dan Kas Dana BOS per 1 Januari 2021	Rp	97.076.772.681,14
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	577.492.752.612,25
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(Rp	411.493.454.468,39)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	26.374.970,00
f. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas Di Bendahara Pegeluaran, KAS BLUD dan Kas Dana BOS per 31 Desember 2021	Rp	263.102.445.795,00
g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021	Rp	8.264.000,00
h. Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2021	Rp	1.682.769.217,87
i. Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2021	Rp	264.793.479.012,87

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

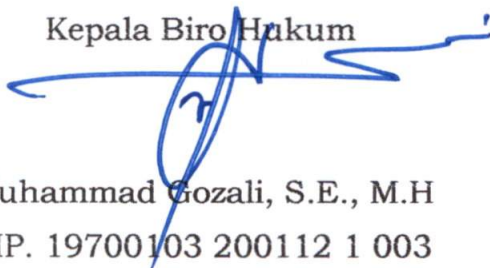
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 14 Oktober 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (2-177/2022)

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.536.758.560.876,00	2.609.501.844.013,92	72.743.283.137,92	102,87
4.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	200.000.000.000,00	254.987.802.871,47	54.987.802.871,47	127,49
4.1.01	Pendidikan	-	14.124.671,05	14.124.671,05	0,00
4.1.01.1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	-	14.124.671,05	14.124.671,05	0,00
4.1.02	Kesehatan	200.000.000.000,00	254.973.678.200,42	54.973.678.200,42	127,49
4.1.02.1.02.01	DINAS KESEHATAN	200.000.000.000,00	254.973.678.200,42	54.973.678.200,42	127,49
4.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.336.758.560.876,00	2.354.514.041.142,45	17.755.480.266,45	100,76
4.4.04	Keuangan	2.336.758.560.876,00	2.354.514.041.142,45	17.755.480.266,45	100,76
4.4.04.4.04.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.872.571.187.894,00	1.890.949.863.341,00	18.378.675.447,00	100,98
4.4.04.4.04.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	464.187.372.982,00	463.564.177.801,45	(623.195.180,55)	99,87
	BELANJA DAERAH	2.612.861.708.527,00	2.372.645.890.287,06	(240.215.818.239,94)	90,81
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.381.394.041.362,00	1.334.103.766.059,59	(47.290.275.302,41)	96,58
1.01	Pendidikan	667.191.684.385,00	637.031.146.305,08	(30.160.538.079,92)	95,48
1.01.1-01.2-22.0-00.02	DINAS PENDIDIKAN	667.191.684.385,00	637.031.146.305,08	(30.160.538.079,92)	95,48
	BELANJA OPERASI	531.102.883.644,00	521.969.648.562,08	(9.133.235.081,92)	98,28
	Belanja Pegawai	264.427.728.273,00	257.918.056.523,00	(6.509.671.750,00)	97,54
	Belanja Barang dan Jasa	129.967.495.371,00	124.083.669.039,08	(5.883.826.331,92)	95,47
	Belanja Hibah	136.707.660.000,00	139.967.923.000,00	3.260.263.000,00	102,38
	BELANJA MODAL	136.088.800.741,00	115.061.497.743,00	(21.027.302.998,00)	84,55
1.02	Kesehatan	369.252.775.788,00	378.544.162.164,12	9.291.386.376,12	102,52
1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	369.252.775.788,00	378.544.162.164,12	9.291.386.376,12	102,52
	BELANJA OPERASI	330.903.213.145,00	346.514.233.353,12	15.611.020.208,12	104,72
	Belanja Pegawai	106.795.181.349,00	104.398.432.354,00	(2.396.748.995,00)	97,76
	Belanja Barang dan Jasa	224.108.031.796,00	242.115.800.999,12	18.007.769.203,12	108,04
	BELANJA MODAL	38.349.562.643,00	32.029.928.811,00	(6.319.633.832,00)	83,52
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.322.209.151,00	281.789.788.347,39	(20.532.420.803,61)	93,21
1.03.1-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	302.322.209.151,00	281.789.788.347,39	(20.532.420.803,61)	93,21
	BELANJA OPERASI	100.559.871.718,00	92.234.610.567,00	(8.325.261.151,00)	91,72
	Belanja Pegawai	13.680.860.850,00	12.535.145.879,00	(1.145.714.971,00)	91,63
	Belanja Barang dan Jasa	86.879.010.868,00	79.699.464.688,00	(7.179.546.180,00)	91,74
	BELANJA MODAL	201.762.337.433,00	189.555.177.780,39	(12.207.159.652,61)	93,95
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	27.484.467.552,00	24.136.304.654,00	(3.348.162.898,00)	87,82
1.05.1-05.0-00.0-00.01	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	14.265.365.347,00	13.041.727.266,00	(1.223.638.081,00)	91,42
	BELANJA OPERASI	14.204.204.604,00	12.989.842.926,00	(1.214.361.678,00)	91,45
	Belanja Pegawai	4.423.177.968,00	4.010.760.053,00	(412.417.915,00)	90,68
	Belanja Barang dan Jasa	9.781.026.636,00	8.979.082.873,00	(801.943.763,00)	91,80
	BELANJA MODAL	61.160.743,00	51.884.340,00	(9.276.403,00)	84,83
1.05.1-05.0-00.0-00.04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.219.102.205,00	11.094.577.388,00	(2.124.524.817,00)	83,93
	BELANJA OPERASI	12.817.839.376,00	10.718.582.388,00	(2.099.256.988,00)	83,62
	Belanja Pegawai	5.475.187.587,00	4.735.687.173,00	(739.500.414,00)	86,49
	Belanja Barang dan Jasa	7.342.651.789,00	5.982.895.215,00	(1.359.756.574,00)	81,48
	BELANJA MODAL	401.262.829,00	375.995.000,00	(25.267.829,00)	93,70
1.06	Sosial	15.142.904.486,00	12.602.364.589,00	(2.540.539.897,00)	83,22
1.06.1-06.0-00.0-00.01	DINAS SOSIAL	15.142.904.486,00	12.602.364.589,00	(2.540.539.897,00)	83,22
	BELANJA OPERASI	14.949.869.626,00	12.429.541.403,00	(2.520.328.223,00)	83,14
	Belanja Pegawai	6.706.022.542,00	5.415.123.899,00	(1.290.898.643,00)	80,75
	Belanja Barang dan Jasa	7.591.847.084,00	6.394.814.004,00	(1.197.033.080,00)	84,23
	Belanja Hibah	159.000.000,00	134.343.000,00	(24.657.000,00)	84,49
	Belanja Bantuan Sosial	493.000.000,00	485.260.500,00	(7.739.500,00)	98,43
	BELANJA MODAL	193.034.860,00	172.823.186,00	(20.211.674,00)	89,53
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	186.003.269.531,00	168.560.397.923,00	(17.442.871.608,00)	90,62
2.07	Tenaga Kerja	8.801.832.385,00	7.366.959.729,00	(1.434.872.656,00)	83,70
2.07.2-07.3-32.0-00.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.801.832.385,00	7.366.959.729,00	(1.434.872.656,00)	83,70
	BELANJA OPERASI	8.636.937.152,00	7.203.181.166,00	(1.433.755.986,00)	83,40
	Belanja Pegawai	5.778.894.315,00	4.942.928.682,00	(835.965.633,00)	85,53
	Belanja Barang dan Jasa	2.858.042.837,00	2.260.252.484,00	(597.790.353,00)	79,08
	BELANJA MODAL	164.895.233,00	163.778.563,00	(1.116.670,00)	99,32
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.204.814.911,00	12.125.109.860,00	(1.079.705.051,00)	91,82
2.08.2-08.2-14.0-00.02	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.204.814.911,00	12.125.109.860,00	(1.079.705.051,00)	91,82
	BELANJA OPERASI	12.765.982.846,00	11.718.304.160,00	(1.047.678.686,00)	91,79
	Belanja Pegawai	7.075.435.605,00	6.712.444.011,00	(362.991.594,00)	94,87
	Belanja Barang dan Jasa	5.690.547.241,00	5.005.860.149,00	(684.687.092,00)	87,97
	BELANJA MODAL	438.832.065,00	406.805.700,00	(32.026.365,00)	92,70
2.09	Pangan	16.843.054.624,00	14.732.869.872,00	(2.110.184.752,00)	87,47
2.09.2-09.3-27.0-00.02	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	16.843.054.624,00	14.732.869.872,00	(2.110.184.752,00)	87,47
	BELANJA OPERASI	16.568.706.428,00	14.477.336.943,00	(2.091.369.485,00)	87,38
	Belanja Pegawai	10.635.083.867,00	9.932.430.335,00	(702.653.532,00)	93,39
	Belanja Barang dan Jasa	5.933.622.561,00	4.544.906.608,00	(1.388.715.953,00)	76,60
	BELANJA MODAL	274.348.196,00	255.532.929,00	(18.815.267,00)	93,14
2.11	Lingkungan Hidup	17.653.515.857,00	15.834.047.669,00	(1.819.468.188,00)	89,69
2.11.2-11.0-00.0-00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.653.515.857,00	15.834.047.669,00	(1.819.468.188,00)	89,69
	BELANJA OPERASI	15.009.016.230,00	13.356.635.169,00	(1.652.381.061,00)	88,99
	Belanja Pegawai	5.929.841.814,00	5.212.067.153,00	(717.774.661,00)	87,90
	Belanja Barang dan Jasa	5.079.174.416,00	4.144.568.016,00	(934.606.400,00)	81,60

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
	Belanja Hibah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	100,00
	BELANJA MODAL	2.644.499.627,00	2.477.412.500,00	(167.087.127,00)	93,68
2.12	Administrasi Kependudukan dan Capil	8.491.413.800,00	7.956.808.206,00	(534.605.594,00)	93,70
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.491.413.800,00	7.956.808.206,00	(534.605.594,00)	93,70
	BELANJA OPERASI	7.920.680.345,00	7.401.047.826,00	(519.632.519,00)	93,44
	Belanja Pegawai	4.874.618.460,00	4.472.802.277,00	(401.816.183,00)	91,76
	Belanja Barang dan Jasa	3.046.061.885,00	2.928.245.549,00	(117.816.336,00)	96,13
	BELANJA MODAL	570.733.455,00	555.760.380,00	(14.973.075,00)	97,38
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.557.448.849,00	9.152.931.387,00	(1.404.517.462,00)	86,70
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.557.448.849,00	9.152.931.387,00	(1.404.517.462,00)	86,70
	BELANJA OPERASI	10.356.999.150,00	8.967.969.387,00	(1.389.029.763,00)	86,59
	Belanja Pegawai	4.957.495.633,00	4.875.851.109,00	(81.644.524,00)	98,35
	Belanja Barang dan Jasa	5.399.503.517,00	4.092.118.278,00	(1.307.385.239,00)	75,79
	BELANJA MODAL	200.449.699,00	184.962.000,00	(15.487.699,00)	92,27
2.15	Perhubungan	51.645.275.581,00	49.968.028.435,00	(1.677.247.146,00)	96,75
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01	DINAS PERHUBUNGAN	51.645.275.581,00	49.968.028.435,00	(1.677.247.146,00)	96,75
	BELANJA OPERASI	43.534.827.234,00	41.934.247.435,00	(1.600.579.799,00)	96,32
	Belanja Pegawai	10.393.257.933,00	9.862.095.747,00	(531.162.186,00)	94,89
	Belanja Barang dan Jasa	19.994.569.301,00	18.984.277.163,00	(1.010.292.138,00)	94,95
	Belanja Subsidi	12.970.000.000,00	12.967.841.605,00	(2.158.395,00)	99,98
	Belanja Bantuan Sosial	177.000.000,00	120.032.920,00	(56.967.080,00)	67,82
	BELANJA MODAL	8.110.448.347,00	8.033.781.000,00	(76.667.347,00)	99,05
2.16	Komunikasi dan Informatika	30.830.025.022,00	27.674.419.381,00	(3.155.605.641,00)	89,76
2.16 . 2-16.0-00.0-00.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	30.830.025.022,00	27.674.419.381,00	(3.155.605.641,00)	89,76
	BELANJA OPERASI	27.958.853.605,00	25.224.768.376,00	(2.734.085.229,00)	90,22
	Belanja Pegawai	6.186.619.768,00	5.185.068.724,00	(1.001.551.044,00)	83,81
	Belanja Barang dan Jasa	21.772.233.837,00	20.039.699.652,00	(1.732.534.185,00)	92,04
	BELANJA MODAL	2.871.171.417,00	2.449.651.005,00	(421.520.412,00)	85,32
2.18	Penanaman Modal	11.534.182.775,00	9.129.811.435,00	(2.404.371.340,00)	79,15
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01	DINAS PENANAMAN MODAL	11.534.182.775,00	9.129.811.435,00	(2.404.371.340,00)	79,15
	BELANJA OPERASI	11.395.442.505,00	9.019.522.160,00	(2.375.920.345,00)	79,15
	Belanja Pegawai	6.337.610.020,00	4.975.378.107,00	(1.362.231.913,00)	78,51
	Belanja Barang dan Jasa	5.057.832.485,00	4.044.144.053,00	(1.013.688.432,00)	79,96
	BELANJA MODAL	138.740.270,00	110.289.275,00	(28.450.995,00)	79,49
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	8.024.825.452,00	7.415.322.674,00	(609.502.778,00)	92,40
2.19 . 2-19.0-00.0-00.01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	8.024.825.452,00	7.415.322.674,00	(609.502.778,00)	92,40
	BELANJA OPERASI	7.963.942.991,00	7.356.632.674,00	(607.310.317,00)	92,37
	Belanja Pegawai	4.374.975.678,00	3.958.992.640,00	(415.983.038,00)	90,49
	Belanja Barang dan Jasa	3.588.967.313,00	3.397.640.034,00	(191.327.279,00)	94,67
	BELANJA MODAL	60.882.461,00	58.690.000,00	(2.192.461,00)	96,40
2.23	Perpustakaan	8.416.880.275,00	7.204.089.275,00	(1.212.791.000,00)	85,59
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.416.880.275,00	7.204.089.275,00	(1.212.791.000,00)	85,59
	BELANJA OPERASI	7.920.157.367,00	6.775.716.775,00	(1.144.440.592,00)	85,55
	Belanja Pegawai	5.523.494.064,00	4.917.879.026,00	(605.615.038,00)	89,04
	Belanja Barang dan Jasa	2.396.663.303,00	1.857.837.749,00	(538.825.554,00)	77,52
	BELANJA MODAL	496.722.908,00	428.372.500,00	(68.350.408,00)	86,24
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	197.797.236.839,00	134.146.308.696,27	(63.650.928.142,73)	67,82
3.25	Kelautan dan Perikanan	33.214.709.419,00	28.141.983.411,27	(5.072.726.007,73)	84,73
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	33.214.709.419,00	28.141.983.411,27	(5.072.726.007,73)	84,73
	BELANJA OPERASI	21.031.436.017,00	18.967.920.508,27	(2.063.515.508,73)	90,19
	Belanja Pegawai	8.923.663.170,00	7.958.179.772,27	(965.483.397,73)	89,18
	Belanja Barang dan Jasa	12.107.772.847,00	11.009.740.736,00	(1.098.032.111,00)	90,93
	BELANJA MODAL	12.183.273.402,00	9.174.062.903,00	(3.009.210.499,00)	75,30
3.26	Pariwisata	15.456.728.632,00	13.814.528.141,00	(1.642.200.491,00)	89,38
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA	15.456.728.632,00	13.814.528.141,00	(1.642.200.491,00)	89,38
	BELANJA OPERASI	15.305.776.911,00	13.678.482.141,00	(1.627.294.770,00)	89,37
	Belanja Pegawai	5.477.185.892,00	4.809.925.183,00	(667.260.709,00)	87,82
	Belanja Barang dan Jasa	6.773.591.019,00	5.835.611.358,00	(937.979.661,00)	86,15
	Belanja Hibah	3.055.000.000,00	3.032.945.600,00	(22.054.400,00)	99,28
	BELANJA MODAL	150.951.721,00	136.046.000,00	(14.905.721,00)	90,13
3.28	Kehutanan	112.010.760.159,00	60.534.296.800,00	(51.476.463.359,00)	54,04
3.28 . 3-28.0-00.0-00.01	DINAS KEHUTANAN	112.010.760.159,00	60.534.296.800,00	(51.476.463.359,00)	54,04
	BELANJA OPERASI	84.137.247.313,00	48.237.767.591,00	(35.899.479.722,00)	57,33
	Belanja Pegawai	21.364.390.802,00	19.680.695.284,00	(1.683.695.518,00)	92,12
	Belanja Barang dan Jasa	52.451.336.511,00	23.316.742.096,00	(29.134.594.415,00)	44,45
	Belanja Hibah	10.321.520.000,00	5.240.330.211,00	(5.081.189.789,00)	50,77
	BELANJA MODAL	27.873.512.846,00	12.296.529.209,00	(15.576.983.637,00)	44,12
3.29	Energi dan Sumberdaya Mineral	10.415.075.644,00	9.557.979.180,00	(857.096.464,00)	91,77
3.29 . 3-29.0-00.0-00.01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10.415.075.644,00	9.557.979.180,00	(857.096.464,00)	91,77
	BELANJA OPERASI	10.411.564.995,00	9.557.979.180,00	(853.585.815,00)	91,80
	Belanja Pegawai	6.381.191.817,00	5.585.969.176,00	(795.222.641,00)	87,54
	Belanja Barang dan Jasa	4.030.373.178,00	3.972.010.004,00	(58.363.174,00)	98,55
	BELANJA MODAL	3.510.649,00	-	(3.510.649,00)	0,00
3.31	Perindustrian	26.699.962.985,00	22.097.521.164,00	(4.602.441.821,00)	82,76
3.31 . 3-31.3-30.2-17.02	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI U	26.699.962.985,00	22.097.521.164,00	(4.602.441.821,00)	82,76
	BELANJA OPERASI	26.421.098.347,00	21.856.873.164,00	(4.564.225.183,00)	82,73
	Belanja Pegawai	8.543.148.141,00	7.073.819.833,00	(1.469.328.308,00)	82,80
	Belanja Barang dan Jasa	8.027.938.797,00	5.803.591.731,00	(2.224.347.066,00)	72,29
	Belanja Subsidi	8.500.000.000,00	8.199.461.600,00	(300.538.400,00)	96,46
	Belanja Hibah	1.350.011.409,00	780.000.000,00	(570.011.409,00)	57,78
	BELANJA MODAL	278.864.638,00	240.648.000,00	(38.216.638,00)	86,30
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	287.491.707.053,00	248.422.391.731,00	(39.069.315.322,00)	86,41
4.01	Sekretariat Daerah	195.246.656.578,00	169.491.314.592,00	(25.755.341.986,00)	86,81
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	195.246.656.578,00	169.491.314.592,00	(25.755.341.986,00)	86,81
	BELANJA OPERASI	189.199.237.178,00	164.706.674.294,00	(24.492.562.884,00)	87,05
	Belanja Pegawai	51.480.940.753,00	40.027.455.762,00	(11.453.484.991,00)	77,75
	Belanja Pegawai	91.712.321.425,00	80.600.522.615,00	(11.111.798.810,00)	87,88
	Belanja Subsidi	45.235.975.000,00	43.458.695.917,00	(1.777.279.083,00)	96,07
	Belanja Hibah	770.000.000,00	620.000.000,00	(150.000.000,00)	80,52
	Belanja Bantuan Sosial	6.047.419.400,00	4.784.640.296,00	(1.262.779.102,00)	79,12
4.02	Sekretariat DPRD	92.245.050.475,00	78.931.077.139,00	(13.313.973.336,00)	85,57

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DPRD	92.245.050.475,00	78.931.077.139,00	(13.313.973.336,00)	85,57
	BELANJA OPERASI	90.249.444.001,00	77.047.839.289,00	(13.201.604.712,00)	85,37
	Belanja Pegawai	29.776.393.123,00	28.575.216.012,00	(1.201.177.111,00)	95,97
	Belanja Barang dan Jasa	60.473.050.878,00	48.472.623.277,00	(12.000.427.601,00)	80,16
	BELANJA MODAL	1.995.606.474,00	1.883.237.850,00	(112.368.624,00)	94,37
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	526.420.078.477,00	458.844.621.339,20	(67.575.457.137,80)	87,16
5.01	Perencanaan	29.147.286.642,00	19.606.520.468,00	(9.540.766.174,00)	67,27
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	29.147.286.642,00	19.606.520.468,00	(9.540.766.174,00)	67,27
	BELANJA OPERASI	28.188.029.765,00	18.727.585.640,00	(9.460.444.125,00)	66,44
	Belanja Pegawai	9.574.099.895,00	8.542.403.639,00	(1.031.696.256,00)	89,22
	Belanja Barang dan Jasa	18.538.929.870,00	10.185.182.001,00	(8.353.747.869,00)	54,94
	Belanja Hibah	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	0,00
	BELANJA MODAL	959.256.877,00	878.934.828,00	(80.322.049,00)	91,63
5.02	Keuangan	454.148.370.731,00	402.764.924.200,20	(51.383.446.530,80)	88,69
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	408.938.633.567,00	363.185.636.256,20	(45.752.997.310,80)	88,81
	BELANJA OPERASI	40.159.965.866,00	24.413.359.242,00	(15.746.606.624,00)	60,79
	Belanja Pegawai	15.835.934.355,00	9.935.314.445,00	(5.900.619.910,00)	62,74
	Belanja Barang dan Jasa	24.324.031.511,00	14.478.044.797,00	(9.845.986.714,00)	59,52
	BELANJA MODAL	8.140.221.458,00	4.246.334.223,00	(3.893.887.235,00)	52,16
	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.550.000.000,00	11.924.306.413,00	(2.625.693.587,00)	81,95
	BELANJA TRANSFER	346.088.446.243,00	322.601.636.378,20	(23.486.809.864,80)	93,21
5.02 . 5-02.0-00.0-00.10	BADAN PENDAPATAN DAERAH	45.209.737.164,00	39.579.287.944,00	(5.630.449.220,00)	87,55
	BELANJA OPERASI	43.274.633.751,00	37.721.636.256,00	(5.552.997.495,00)	87,17
	Belanja Pegawai	25.762.945.142,00	22.492.108.158,00	(3.270.836.984,00)	87,30
	Belanja Barang dan Jasa	17.511.688.609,00	15.229.528.098,00	(2.282.160.511,00)	86,97
	BELANJA MODAL	1.935.103.413,00	1.857.651.688,00	(77.451.725,00)	96,00
5.03	Kepegawaian	11.597.400.204,00	9.416.921.566,00	(2.180.478.638,00)	81,20
5.03 . 5-03.0-00.0-00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11.597.400.204,00	9.416.921.566,00	(2.180.478.638,00)	81,20
	BELANJA OPERASI	11.171.722.732,00	9.004.681.434,00	(2.167.041.298,00)	80,60
	Belanja Pegawai	5.660.759.214,00	5.108.083.475,00	(552.675.739,00)	90,24
	Belanja Barang dan Jasa	5.510.963.518,00	3.896.597.959,00	(1.614.365.559,00)	70,71
	BELANJA MODAL	425.677.472,00	412.240.132,00	(13.437.340,00)	96,84
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	12.505.128.446,00	10.016.700.554,00	(2.488.427.892,00)	80,10
5.04 . 5-04.0-00.0-00.01	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.505.128.446,00	10.016.700.554,00	(2.488.427.892,00)	80,10
	BELANJA OPERASI	12.244.021.229,00	9.793.773.054,00	(2.450.248.175,00)	79,99
	Belanja Pegawai	5.932.623.456,00	5.349.588.907,00	(583.034.549,00)	90,17
	Belanja Barang dan Jasa	6.311.397.773,00	4.444.184.147,00	(1.867.213.626,00)	70,42
	BELANJA MODAL	261.107.217,00	222.927.500,00	(38.179.717,00)	85,38
5.06	Pengelola Perbatasan Daerah	8.313.273.356,00	6.632.805.233,00	(1.680.468.123,00)	79,79
5.06 . 5-06.0-00.0-00.01	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	8.313.273.356,00	6.632.805.233,00	(1.680.468.123,00)	79,79
	BELANJA OPERASI	7.585.541.678,00	5.931.738.858,00	(1.653.802.820,00)	78,20
	Belanja Pegawai	4.974.574.098,00	3.438.875.519,00	(1.535.698.579,00)	69,13
	Belanja Barang dan Jasa	2.610.967.580,00	2.492.863.339,00	(118.104.241,00)	95,48
	BELANJA MODAL	727.731.678,00	701.066.375,00	(26.665.303,00)	96,34
5.07	Penghubung	10.708.619.098,00	10.406.749.318,00	(301.869.780,00)	97,18
5.07 . 5-07.0-00.0-00.01	BADAN PENGHUBUNG	10.708.619.098,00	10.406.749.318,00	(301.869.780,00)	97,18
	BELANJA OPERASI	10.699.619.098,00	10.397.949.318,00	(301.669.780,00)	97,18
	Belanja Pegawai	3.185.431.672,00	3.119.210.854,00	(66.220.818,00)	97,92
	Belanja Barang dan Jasa	7.514.187.426,00	7.278.738.464,00	(235.448.962,00)	96,87
	BELANJA MODAL	9.000.000,00	8.800.000,00	(200.000,00)	97,78
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	20.055.404.647,00	17.470.871.962,00	(2.584.532.685,00)	87,11
6.01	Inspektorat	20.055.404.647,00	17.470.871.962,00	(2.584.532.685,00)	87,11
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01	INSPEKTORAT	20.055.404.647,00	17.470.871.962,00	(2.584.532.685,00)	87,11
	BELANJA OPERASI	18.175.791.477,00	15.785.944.812,00	(2.389.846.665,00)	86,85
	Belanja Pegawai	8.808.498.416,00	8.069.637.215,00	(738.861.201,00)	91,61
	Belanja Barang dan Jasa	9.367.293.061,00	7.716.307.597,00	(1.650.985.464,00)	82,37
	BELANJA MODAL	1.879.613.170,00	1.684.927.150,00	(194.686.020,00)	89,64
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	13.699.970.618,00	11.097.532.576,00	(2.602.438.042,00)	81,00
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	13.699.970.618,00	11.097.532.576,00	(2.602.438.042,00)	81,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.699.970.618,00	11.097.532.576,00	(2.602.438.042,00)	81,00
	BELANJA OPERASI	13.690.959.545,00	11.097.532.576,00	(2.593.426.969,00)	81,06
	Belanja Pegawai	5.980.253.166,00	4.727.386.333,00	(1.252.866.833,00)	79,05
	Belanja Barang dan Jasa	5.210.706.421,00	3.870.146.289,00	(1.340.560.132,00)	74,27
	Belanja Hibah	2.499.999.958,00	2.499.999.954,00	(4,00)	100,00
	BELANJA MODAL	9.011.073,00	-	(9.011.073,00)	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(76.103.147.651,00)	236.855.953.726,86	312.959.101.377,86	-311,23

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Muhammad Gozali, S.E., M.H
NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG